



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazib Faizal
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Agus Harimurti Yudhoyono
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Maret 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Agus Harimurti Yudhoyono

Nazib Faizal

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA,
DAN TATA RUANG

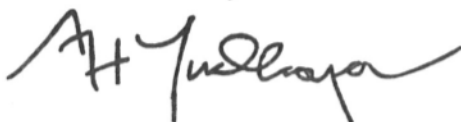
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SP.1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan	IKSP 1.1	Persentase capaian target pembangunan bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	100%
SP.2	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP 2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	100%
		IKSP 2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3,1
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Efektif dan Efisien	IKSP 3.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91
		IKSP 3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91

NO	RINCIAN OUTPUT (RO)/KOMPONEN	ANGGARAN
1	Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Rp13.110.165.000
2	Dukungan Manajemen	Rp1.650.000.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp14.760.165.000*

*Anggaran diblokir kode A (Efisiensi Belanja) sebesar Rp13.804.460.000 sesuai DIPA Petikan Revisi Ke-4 Nomor : SP DIPA-132.01.1.694776/2025 tanggal 14 Maret 2025

Jakarta, 20 Maret 2025

Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan



Agus Harimurti Yudhoyono

Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah,
Agraria, dan Tata Ruang



Nazib Faizal

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA,
DAN TATA RUANG

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
IKSP.1.1	Persentase capaian target pembangunan bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Pemerataan Pembangunan Wilayah: 1. Indeks Williamson 2. Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi 3. Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Daerah Tertinggal				✓
		Agraria: 4. Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah 5. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima Reforma Agraria				✓
		Tata Ruang: 6. Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal 7. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir				✓
IKSP.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	1. <i>One Spatial Planning Policy (OSPP)</i>	✓	✓	✓	✓
		2. <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)</i>	✓	✓	✓	✓
		3. Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta	✓	✓		
		4. Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	✓	✓	✓	✓
		5. <i>Blue Economy</i>	✓	✓	✓	✓
		6. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional	✓	✓	✓	✓
		7. Pengembangan Kawasan Desa	✓	✓	✓	✓
		8. Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara	✓	✓	✓	✓

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
IKSP.2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	✓	✓	✓	✓
IKSP.3.1	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang			✓	
IKSP.3.2	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang				✓

Jakarta, 20 Maret 2025

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan
Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Nazib Faizal

N **Nazib Faizal**

MATRIKS DUKUNGAN PENCAPAIAN KINERJA MENKO TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG

LEVEL MENKO				LEVEL ESELON I			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	METODE CASCADING	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FREKUENSI
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase capaian target pembangunan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan	100%	Direct	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan	Persentase capaian target pembangunan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	100%	Tahunan
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	Direct	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	Tahunan
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan	3,1	Indirect		Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3,1	Tahunan
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	91,1	Indirect	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien	Nilai PMPZI Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	Tahunan
					Nilai SAKIP Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	Tahunan

Jakarta, 20 Maret 2025

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan
Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang


Nazib Faizal
Nazib Faizal